

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dalam pengertian ini, pendidikan merupakan produk budaya yang dilahirkan dari proses interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan terlahir dan berakhir bersamaan dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan dilaksanakan dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan merupakan modal terciptanya sumberdaya manusia yang handal, terampil dan memiliki sikap dan kepribadian sesuai dengan dasar negara pancasila. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumberdaya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan kerja. Oleh karena itu tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (*Human Investment*). Theodore W. Schultz dalam Nanang Fatah (2002:5) menyatakan bahwa "Proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi." Teori *Human Capital* telah mampu mempengaruhi para ilmuwan dan pengambil keputusan dalam

pembinaan sumberdaya manusia sehingga mendorong tumbuhnya permintaan pendidikan di negara-negara berkembang pasca penjajahan.

Nilai modal manusia (*Human capital*) suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau tenaga kerja kasar tetapi sangat ditentukan oleh tenaga kerja intelektual. Adam Smith (1952) menyatakan bahwa :

“Pendidikan dan latihan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kesejahteraan dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada keunggulan intelegensia dan intelektual.”

Dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak serta-merta tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk menghasikan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.

Pendidikan politik sebagai salah satu bagian dari pendidikan pada umumnya memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Tata kehidupan berbangsa merupakan suatu corak kehidupan kolektif yang dipersatukan oleh idiom-idiom kebangsaan. Oleh sebab itu, demi eksistensi dan kelangsungan suatu bangsa, idiom-idiom pemersatu ini harus ditranformasikan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Dengan demikian betapa pentingnya pendidikan politik untuk ditanamkan kepada setiap warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Melalui pendidikan politik, diharapkan lahir warga negara yang demokratis, patuh kepada hukum, sadar akan keberagaman, dan menghargai nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan secara beradab.

Pendidikan politik kader bangsa seperti pemuda dan mahasiswa bertujuan untuk memberikan wawasan tentang cakrawala politik yang dapat melahirkan kader-kader bangsa yang memiliki sikap dan kualitas kepemimpinan yang tangguh. Oleh karena itu pendidikan politik dan kepemimpinan merupakan upaya strategis dalam membina kader bangsa. Pembinaan dan pengembangan pemuda, bertujuan untuk melahirkan kader bangsa yang dapat menjadi pemimpin dan penerus pembangunan. Pembinaan dan proses peralihan generasi dianggap berhasil jika mampu melahirkan pemimpin yang berwawasan luas dan bersikap demokratis.

Pembinaan dan pendidikan politik maupun latihan kepemimpinan merupakan upaya yang perlu dilakukan di dalam maupun di luar kampus, baik dalam kegiatan ekstra maupun intra universitas. Hal ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan dan bersikap demokratis. Sikap demokratis dapat diperoleh dari pendidikan formal, informal maupun non formal. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan, dapat memfasilitasi dan mengakomodir tujuan tersebut mengingat supra maupun infra strukturnya dapat dikatakan memadai dan representatif.

Kepemimpinan merupakan sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, kepemimpinan memerlukan pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dapat dikembangkan di dalam organisasi formal maupun informal. G.R. Terry (1964) menyatakan bahwa "Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok". Sejalan dengan pendapat di atas, Ordway dalam Solihah (2000) mengartikan kepemimpinan sebagai "kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan". Kepemimpinan

merupakan penggerak bagi sumber dan alat-alat sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya bukan hanya ditentukan oleh tingkat keterampilan teknis saja, tetapi juga oleh keahliannya dalam menggerakkan orang lain yang sering disebut *managerial skill* (Solihah 2000).

Penanaman nilai-nilai politik yang mengacu pada nilai dasar Pancasila, merupakan wahana pembinaan dan pembentukan kesadaran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu dalam membentuk kesadaran politik suatu bangsa, pendidikan politik harus ditanamkan dan dibina dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembinaan tersebut dapat dilahirkan dengan pentransferan nilai dari generasi ke generasi berikutnya. Proses pembinaan pemuda membutuhkan suasana yang kondusif dengan melibatkan segenap potensi dan wadah pembinaan pemuda yang ada. Dalam upaya pemantapan sistem sosial, peranan dan partisipasi pemuda sangat diperlukan. Untuk itu pemuda harus dapat terus mengembangkan ciri-cirinya yang telah mewarnai perjuangannya di masa lalu dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Wadah-wadah organisasi pemuda diharapkan mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat, serta mampu memainkan peran aktif dan dinamis yang menjadi ciri khas keberadaan pemuda di tengah-tengah masyarakat.

Untuk merealisasikan usaha di atas, bukan mustahil akan ditemui kesulitan berkenaan dengan kondisi budaya politik yang ada sekarang. Salah satu kesulitan yang terkandung dalam tantangan itu adalah berupa realita budaya politik yang masih diwarnai oleh nilai-nilai yang kurang atau tidak sesuai dengan tuntutan nilai tersebut. Nilai-nilai itu antara meliputi nilai-nilai feodalisme dan primordialisme yang

tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik secara sosial budaya maupun politik.

Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang berperilaku baik dan demokratis. Dengan demikian, diharapkan warga negara memiliki gagasan, pemikiran, dan pemahaman tentang etika politik, sehingga dapat menjadi generasi harapan bangsa dengan tidak kehilangan karsa, cita-cita dan arah untuk menghadapi masa depan serta siap menghadapi tantangan dan rintangan berat yang menghadang. Apabila berhasil, pendidikan politik akan mempengaruhi dan memberi warna terhadap perilaku politik yang ditampilkan individu termasuk perilaku politik mahasiswa.

Rusadi Kantaprawira (1999:55) memandang bahwa "Pendidikan politik sebagai salah satu fungsi struktur politik" bertujuan meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Menurut penegasan A.Kosasih Djahiri (1996:19) dan Abdul Azis Wahab (1996:6) pendidikan politik bertujuan agar warga negara "melek politik" sehingga dengan berbekal pengetahuan dan pemahaman pendidikan politik, mereka akan memiliki kematangan dalam bersikap dan berperilaku politik.

Pendidikan politik yang ditanamkan kepada warga negara, menurut Rusadi Kantaprawira (1999:57) dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan-bahan yang dapat dibaca (Readable, Legible) seperti surat kabar, majalah, dll. yang bersifat publikasi masa dan yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran seperti radio yang dapat didengar (Audible) dan televisi serta film yang dapat dilihat dan didengar (bersifat Audiovisual).
3. Lembaga-lembaga asosiasi dalam masyarakat seperti mesjid dan gereja yang menyampaikan khotbah serta kemungkinan juga formal maupun informal.

Pembinaan generasi muda mempunyai dua sasaran pembinaan yaitu formal dan nonformal. Untuk jalur nonformal, sasaran pembinaan adalah para pemuda dari berbagai lapisan dengan wadah organisasi masa maupun politik. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menduduki posisi penting dalam setiap fase sejarah, terutama pada era reformasi di mana kualitas kesadaran dan etika politik warga negara merupakan aspek yang sangat penting.

Berdasarkan asumsi di atas, upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda harus merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan generasi muda antara lain pembinaan pendidikan politik kepada generasi muda seperti mahasiswa.

Generasi muda dengan sebutan mahasiswa sudah begitu lekat dengan sebutan kampus dan perguruan tinggi, artinya, mahasiswa adalah individu dalam lingkungan masyarakat yang keberadaannya berbeda dengan sebutan masyarakat pada umumnya. Tak ada universitas atau sebutan perguruan tinggi lain tanpa adanya mahasiswa, namun orang tidak selalu sependapat mengenai kedudukan mahasiswa dalam universitas, termasuk mengenai peranannya (Ahmad Ikhsan, 1985:1).

Dilihat dari kedudukannya, predikat mahasiswa adalah sebagai kelompok elit intelektual (Knopfmacher althbah, 1968). Karakteristik seorang intelektual seperti yang dikemukakan Knopfmacher adalah:

1. Orang-orang yang berpendidikan tinggi yang mempunyai pengetahuan setingkat dengan pengetahuan yang diberikan di perguruan tinggi
2. Berminat pada masalah-masalah yang mempunyai nasib manusia yaitu masalah-masalah moral dan masalah politik.
3. Mampu menyatakan pendirian, pendirian moral dan pendirian politik mereka secara lisan maupun tertulis. (Sarlito, 1978:51).

Sebagai kelompok elit intelektual, mahasiswa memiliki wawasan akademik yang senantiasa responsif terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra universitas mahasiswa akan lebih bermakna apabila secara substansial memuat materi yang mengarah pada kepemimpinan dan partisipasi politik. Mahasiswa berfungsi juga sebagai “kekuatan politik dan moral” (Mar’at 1984:120, 131) yang dapat merubah dari satu situasi ke situasi yang berbeda seperti pengalaman sejarah membuktikan bahwa jatuhnya kekuasaan rezim orde lama dan orde baru oleh kekuatan masa mahasiswa.

Dengan memperhatikan gambaran umum tersebut di atas, kepemimpinan dan partisipasi politik mahasiswa sebagai aplikasi pendidikan politik menarik untuk dikaji. Himpunan mahasiswa PKn dan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung merupakan lokasi penelitian dengan pertimbangan:

1. Perguruan Tinggi ini merupakan perguruan tinggi swasta tertua di Jawa Barat, sepanjang sejarahnya telah tumbuh berbagai organisasi kemahasiswaan intra maupun ekstra universitas yang perkembangannya sangat beragam termasuk aspirasi mahasiswanya.
2. Sebagai sikap kepedulian, penulis ingin mengamati lebih dekat tentang persoalan kepemimpinan dan partisipasi politik.

Dilatarbelakangi pemikiran tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kepemimpinan dan partisipasi politik pada himpunan mahasiswa PKn H dan Matematika sebagai lembaga kemahasiswaan.



B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah

Penelitian ini memberikan penekanan pada “kepemimpinan dan partisipasi politik” tentang perlunya pendidikan politik dalam pembentukan warga negara yang baik dan demokratis. Pendidikan politik pada masa pemerintahan yang berkuasa akan memberikan warna tersendiri dalam pembentukan warga negara, sebagaimana dalam kenyataan sejarah di Indonesia. Persoalannya bagaimana seharusnya pendidikan politik ditanamkan agar dapat melahirkan dan membentuk warga negara yang berperilaku demokratis, melek politik, dan sadar hukum meskipun terdapat keberagaman aspirasi dan seringnya dihadapkan pada perbedaan pendapat.

Terdapatnya perubahan sosial dan sistem politik dalam pemerintahan negara, membawa pengaruh terhadap kebijakan politik yang dijalankan sekaligus mempengaruhi pada pendidikan politik yang harus ditanamkan. Perubahan itu juga membawa dampak pada perubahan-perubahan cara berfikir, cara menilai, cara menghargai hidup dan kenyataan maupun perilaku seseorang. Akibatnya, perubahan tersebut acapkali menimbulkan kekaburan nilai, gejolak politik, konflik sosial, kerusuhan masa, demonstrasi atau unjuk rasa yang tak terkendali, pengrusakan fasilitas atau sarana umum. Di kalangan mahasiswa, persoalan yang berkenaan dengan perilaku politik mencakup unjuk rasa, demonstrasi atau gerakan protes mahasiswa. (Sarlito, 1978).

Esensi pendidikan politik memberi tempat kepada mahasiswa untuk dapat menyelami kehidupan pemerintahan dan kenegaraan seperti menghargai pendapat orang lain, menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan serta memiliki rasa tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat menampilkan perilaku yang positif. Ditegaskan A. Kosasih Djahiri (1996) bahwa

“Melek politik dan konstitusi serta terhadap permasalahan yang dihadapi “harus menjadi dasar pijakan bagi mahasiswa dalam mengamati kehidupan negara Indonesia. Mahasiswa tidak cukup hanya berbekalkan pengetahuan keilmuan semata, tetapi hendaknya memiliki khasanah pendidikan politik yang bermakna. Pendidikan politik bagi mahasiswa dapat diperoleh melalui aktivitas-aktivitas mahasiswa di dalam organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra universitas. Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan merupakan wahana pendidikan politik dalam memupuk dan membina mahasiswa berperilaku demokratis, berwawasan akademik dan politik.

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dalam mengaplikasikan kepemimpinan dan partisipasi politik. Pemimpin selalu menjadi fokus dari semua gerakan aktivitas, usaha dan perubahan menuju pada kemajuan di dalam kelompok atau organisasi. Pemimpin merupakan agen primer untuk menentukan struktur kelompok/organisasi yang dibinanya; juga memberikan motivasi kerja dan menentukan sasaran bersama yang akan dicapai. Pemimpin merupakan inisiator, motivator, stimulator, dinamisator dan inovator dalam organisasinya.

Kepemimpinan merupakan *kekuatan aspirasional, kekuatan semangat dan kekuatan moral* yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi konform dengan keinginan pemimpin. Tingkah laku kelompok atau organisasi menjadi searah dengan kemauan dan aspirasi pemimpin oleh pengaruh interpersonal pemimpin terhadap anak buahnya. Dalam kondisi demikian terdapat kesukarelaan bawahan terhadap pemimpin khususnya dalam usaha mencapai tujuan bersama, dan pada proses pemecahan masalah-masalah yang harus dihadapi secara kolektif.



Dengan demikian, masalah pokok yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kepemimpinan dan partisipasi politik mahasiswa. Organisasi lembaga kemahasiswaan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan dan partisipasi politik, baik di lingkungan universitas maupun di luar universitas.

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana program himpunan mahasiswa PKn dan Matematika FKIP UNPAS?
2. Bagaimana himpunan mahasiswa memotivasi anggotanya untuk dapat berpartisipasi politik di lingkungan himpunan mahasiswa?
3. Mengapa kepemimpinan mahasiswa perlu dibina dan ditumbuhkan?
4. Mengapa partisipasi politik perlu dimiliki oleh mahasiswa?
5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh himpunan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik para anggotanya?
6. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan aplikasi partisipasi politik para anggota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai peranan himpunan mahasiswa dalam menumbuhkan sikap kepemimpinan dan partisipasi politik. Secara spesifik, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tentang program kerja himpunan mahasiswa PKn dan Matematika. Tujuan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar

- himpunan mahasiswa melaksanakan program kerja yang ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan politik dan partisipasi politik mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mengidentifikasi bagaimana himpunan mahasiswa dalam memotivasi anggotanya untuk dapat berpartisipasi politik di lingkungan himpunan mahasiswa. Selain para mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan himpunan juga dapat membagi waktu antara kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.
 - c. Mengidentifikasi mengapa kepemimpinan mahasiswa perlu ditumbuhkan. Kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber dan alat-alat sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini menuntut mahasiswa sebagai pemimpin baik itu sebagai pemimpin diri sendiri maupun pemimpin organisasinya harus siap dengan mental memimpin dan dipimpin. Oleh karena itu, perlu adanya latihan kepemimpinan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas kepemimpinan.
 - d. Mengidentifikasi mengapa partisipasi politik perlu dimiliki oleh mahasiswa. Partisipasi politik merupakan salah satu aplikasi pendidikan politik. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pentingnya partisipasi politik di kalangan mahasiswa.
 - e. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh himpunan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik para anggota himpunan.
 - f. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat baik untuk keperluan pengembangan keilmuan maupun untuk kepentingan praktis dalam kehidupan kemasyarakatan. Kajian ini terfokus pada pokok masalah tentang peran organisasi kemahasiswaan, yaitu himpunan mahasiswa dalam menumbuhkan kepemimpinan dan partisipasi politik.

a. Manfaat Teoretis.

Meskipun ada beberapa penelitian terdahulu menyoroti tentang pendidikan politik dan partisipasi politik, namun relevansinya berbeda karena kajian partisipasi politik merupakan salah satu kajian implementasi pendidikan politik. Hal ini berarti bahwa secara konseptual penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk pengembangan keilmuan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi:

- 1). Institusi, sebagai masukan bagi perguruan tinggi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan pembinaan mahasiswa melalui pendidikan politik sehingga diharapkan melahirkan mahasiswa yang dapat berpartisipasi politik secara sehat, santun, serta berwawasan akademik.
- 2). Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi, komunikasi, dan partisipasi politik dalam suasana dan

nuansa akademik, demokratis, harmonis, serta penuh tanggung jawab khususnya dalam organisasi kemahasiswaan.

D. Definisi Operasional

1. Peranan

Istilah “peranan” mengandung arti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang utama dalam sesuatu hal atau peristiwa (KBBI,1987:735). Peranan himpunan mahasiswa dalam menumbuhkan kepemimpinan dan partisipasi politik yang berarti bagaimana pimpinan (Ketua himpunan) menggerakkan anggotanya untuk memahami dan melaksanakan kepemimpinan maupun partisipasi politik di lingkungannya. Dalam penelitian ini, ketua himpunan mempunyai peran atau memegang peran pimpinan yang utama dalam kegiatan himpunan mahasiswa.

2. Himpunan

Himpunan merupakan kumpulan mahasiswa maupun aktivis di lembaga dalam sebuah organisasi (KBBI,1989:633).

Himpunan dalam penelitian ini adalah organisasi mahasiswa intra universitas di bawah program studi. Himpunan mahasiswa merupakan wahana untuk melakukan aktivitas organisasi, menampung aspirasi anggota serta mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada program studi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan himpunan adalah organisasi kemahasiswaan PKn Hukum dan Matematika yang berada di FKIP UNPAS.

3. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu dalam lingkungan suatu masyarakat yang keberadaannya berbeda dengan sebutan masyarakat. Pada umumnya dilihat dari kedudukannya, predikat mahasiswa adalah sebagai kelompok elit intelektual (Knopfel macher, altbach, 1968). Sarlito (1998:18) menyatakan bahwa mahasiswa adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya dalam ikatannya dengan perguruan tinggi. Dalam penelitian ini mahasiswa adalah mereka yang tercatat pada program studi PKn dan Matematika FKIP UNPAS. Mahasiswa dapat dibedakan dalam tiga kategori, ada aktivis pengikut, aktivis pemimpin, dan non aktivis. Aktivis pengikut yaitu aktivis mahasiswa yang turut aktif dalam kegiatan mahasiswa tanpa mengetahui tujuan yang jelas. Aktivis pemimpin adalah yang memainkan peranan penting dalam suatu pembaharuan negara atau masyarakat (Kartini Kartono,1998:291). Sarlito (1978:18) menyebut pemimpin mahasiswa sebagai kelompok aktivis dan dapat dipandang sebagai kelompok elit mahasiswa, yaitu orang yang sangat berbakat atau terbaik dalam masyarakat (Chaedar Nashir, 2000:21). Artinya elit mahasiswa sebagai orang yang terpilih yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan massa. (Mar'at, 1984:131).

4. **Menumbuhkan** artinya menjadikan, menyebabkan (KBBI, 1987:1099) yang dimaksud dengan menumbuhkan di sini adalah membangkitkan potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi potensi yang berkembang secara optimal, menumbuhkan kepemimpinan dapat melalui faktor ekstern dan intern. Faktor intern adalah motivasi yang datang dari diri

sendiri untuk lebih berkembang, sedangkan faktor ekstern adalah motivasi yang datang dari luar diri individu melalui pembinaan. Yang dimaksud menumbuhkan dalam penelitian ini adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan agar para mahasiswa mampu memimpin diri sendiri maupun orang lain.

5. **Kepemimpinan** adalah satu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas/kemampuan pribadi yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama (Kartini Kartono,2003:163). Pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha; baik di dunia bisnis maupun dunia yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, politik maupun pemerintahan negara. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya. Pemimpin yang sukses apabila mampu mengelola organisasi, bisa mempengaruhi secara konstruktif dan menunjukkan jalan serta perilaku benar yang harus dikerjakan bersama-sama. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok (George R. Terry,1964). Bertolak dari penjelasan di atas, yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah kepemimpinan mahasiswa dalam memimpin organisasi tingkat himpunan.
6. **Partisipasi politik** adalah “kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum” (Herbert McClosky yang dikutip oleh Miriam Budiarjo,1982:1-2). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington Joanelson

(1994:6) bahwa partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara pribadi (*Private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

7. **Pendidikan politik** secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai kehidupan yang dimaksud adalah nilai-nilai dari moral Pancasila serta nilai-nilai kehidupan yang telah diamalkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang diperkuat dan memperkokoh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara (A. Azis Wahab, 1996:5). Pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengolah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1986:243).

Beritik tolak dari penjelasan di atas, penulis berketetapan bahwa yang dimaksud dengan perilaku politik adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan politik yang ditampilkan melalui cara berpikir, bersikap, dan bertindak, baik yang berupa simpati (dukungan) maupun apati (menentang) yang ditujukan dalam bentuk interaksi, komunikasi dan partisipasi para pimpinan mahasiswa baik individu maupun organisasi. Partisipasi politik merupakan salah satu manifestasi dari perilaku politik warga negara terhadap suatu kegiatan yang dianggap sebagai kewajiban.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional (Mar'at, 1984:7). Sebutan pimpinan bisa berbentuk sebagai ketua/kepala seperti ketua badan eksekutif

mahasiswa. Sedangkan sebutan “pemimpin” tidak hanya ditujukan pada jabatan seseorang sebagai ketua atau kepala saja, tetapi bersifat organisatoris, yaitu sejumlah orang yang memangku jabatan dalam kepengurusan suatu organisasi baik sebagai ketua, sekretaris atau jabatan lainnya.

Dalam pandangan Weber (Dalam Johnson, 1988:224,227) bahwa kepemimpinan itu memiliki otoritas/kekuatan, yaitu kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapatkan tantangan dari orang lain. Weber mengidentifikasi tiga dasar legitimasi yang utama dalam hubungan otoritas, ketiganya dibuat berdasarkan tipologi tindakan sosial. Masing-masing tipe berhubungan dengan tipe struktur administratif sendiri dan dinamika sosialnya sendiri yang khusus. Tipe-tipe yang dimaksud adalah otoritas tradisional, otoritas kharismatik, otoritas legal rasional. Kepemimpinan mahasiswa dilihat dari sisi pandangan Weber dapat dikategorikan pada otoritas legal rasional karena mahasiswa memiliki komitmen secara moral dan rasional terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Dengan demikian mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya dalam ikatannya dengan perguruan tinggi.

E. Dasar Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh pemikiran-pemikiran yang dirumuskan dalam wujud proposisi sebagai berikut:

1. Partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara pribadi (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Huntington, 1994:6). Dari definisi di atas meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan, orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik serta perilaku politik yang nyata.
 - b. Kegiatan politik warga negara perorangan dalam peranannya sebagai warga negara.
 - c. Kegiatan politik warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
2. Pendidikan politik
- A. Aziz Wahab (1996:5) menyatakan bahwa "Pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai kehidupan yang dimaksud adalah nilai-nilai dari moral Pancasila serta nilai-nilai kehidupan yang telah diamalkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang memperkuat dan memperkokoh penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan moral Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara. Hal senada dikemukakan Alfian (1986:243) bahwa pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengolah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pada umumnya pendidikan politik atau istilah dalam ilmu politik disebut "Sosialisasi Politik" mengandung pengertian cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi ke generasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Miriam Budiarmo, 1981:1).

3. Himpunan mahasiswa, sebagai organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan berfungsi sebagai wahana inspirasi kegiatan akademik maupun non akademik oleh karena itu pimpinan himpunan mahasiswa mempunyai fungsi dan peran yang cukup berat dalam membimbing para anggotanya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam lingkungannya.
4. Kepemimpinan menempati posisi yang vital dalam kegiatan administrasi dan manajemen, karena merupakan inti dari manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan menggerakkan dan meningkatkan pembinaan serta merupakan proses mempengaruhi aktifitas yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok.

Kepiawaian pimpinan ataupun pengurus lainnya dalam himpunan mahasiswa dapat dijadikan figur untuk dapat memberikan keteladanan, dapat membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kegiatan akademik. Pimpinan mahasiswa adalah mahasiswa aktivis (Kartini Kartono,1998:291) yang memainkan peranan penting dalam suatu pembaharuan negara/masyarakat di tengah gerakan pembangunan bahkan juga pada masa pemberontakan dan revolusi. (Sarlito,1978:18) menyebut kepemimpinan mahasiswa sebagai "kelompok aktivis". Kepemimpinan mahasiswa juga dapat dipandang sebagai kelompok "elit mahasiswa" yaitu orang yang sangat berbakat atau terbaik dalam masyarakat (Haedar Nashir, 2000:21). Ini berarti bahwa elit mahasiswa adalah orang yang terpilih yang memiliki kemampuan (pengaruh) dalam menggerakkan masa. (Mar'at, 1984:131).